

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi global telah berkembang secara dinamis yang menciptakan tantangan besar bagi para pembuat kebijakan, demikian pendapat Menkeu Sri Mulyani dalam Inaugural ASEAN+3 *Economic Cooperation and Financial Stability Forum* (www.kemenkeu.go.id, 2022). Secara umum permasalahan inflasi merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh negara manapun seiring berjalannya waktu, baik ketika perekonomian mengalami pertumbuhan maupun perlambatan. Hakikatnya setiap negara, baik negara berkembang maupun maju selalu memiliki kebutuhan untuk membangun kondisi perekonomian yang stabil dikarenakan adanya dinamika perekonomian global yang dihadapi setiap negara. Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2006). Perubahan inflasi berdampak pada nilai riil uang bukan nilai pada nilai nominalnya. Salah satu faktor utama dalam terjadinya inflasi adalah pertumbuhan volume jumlah uang beredar M2 yang cepat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat maka diikuti oleh kenaikan permintaan agregat, namun jika kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan output yang diproduksi maka harga akan mengalami kenaikan.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan krisis tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga ekonomi. Berbagai upaya penanggulangan telah diterapkan oleh pemerintah negara seluruh

dunia untuk mengendalikan dampak yang ditimbulkan dari wabah penyakit ini. *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 ini turut memberikan efek pada sisi permintaan dan penawaran karena adanya fenomena ini menghambat kemampuan produsen untuk memproduksi serta kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi. Dari sisi *supply*, pembatasan mobilitas yang diberlakukan pemerintah dan faktor kesehatan dari pekerja mengakibatkan penurunan volume produksi yang signifikan sehingga mendorong kenaikan harga. Selain itu, dampak COVID-19 lainnya ialah terganggunya rantai pasokan yang menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang pada akhirnya mendorong terjadinya inflasi. Pada masa pandemi COVID-19 perkembangan pasar keuangan sangatlah tidak stabil dan peredaran mata uang Rupiah yang tersendat menjadi hambatan bagi otoritas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi ditengah permasalahan ekonomi global yang kompleks.

Saat awal pandemi COVID-19 para pelaku ekonomi dan investor sedang optimis sebab prospek perdagangan dunia sangat baik pasca terjadi kesepakatan tahap I perundingan perdagangan AS-Tiongkok. Optimisme pemulihan ekonomi juga terjadi pada dalam negeri sebab tercatat tahun 2019 ekonomi Indonesia mengalami grafik pertumbuhan yang positif serta didukung oleh permintaan domestik yang terjaga. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama setelah merebaknya penularan COVID-19 yang diproyeksikan mampu menghambat pertumbuhan ekonomi seluruh dunia.

Selama pandemi, permintaan dan penawaran barang/jasa di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Konsumsi dan investasi yang semulanya baik menjadi melemah sebab pemberlakuan kebijakan pembatasan mobilitas

masyarakat serta PHK massal yang oleh sejumlah perusahaan menghambat aktivitas ekonomi. Kondisi ekonomi penuh ketidakpastian ini merubah perilaku konsumsi masyarakat yang secara langsung mempengaruhi inflasi.

Menurut Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) BI, Indonesia pada 2019 mengalami perlambatan kinerja perekonomian disebabkan oleh lesunya perekonomian dunia dan melemahnya pertumbuhan investasi swasta. Pada bulan Februari 2020, Indonesia melarang impor hewan hidup dan makanan minuman dari Tiongkok sehingga mengakibatkan tekanan suplai pangan di pasar domestik. Inflasi pun naik menjadi 2,96% dari kuartal sebelumnya sebesar 2,72%.

Pandemi COVID-19 masih belum pulih, Indonesia sudah dihadapi permasalahan inflasi akibat dari ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Ketegangan antar dua negara ini menyebabkan ketidakpastian pasokan energi hingga menghambat aktivitas perekonomian negara-negara di dunia terutama negara yang memiliki ketergantungan impor komoditas energi yang tinggi, salah satunya Indonesia.

Gejolak geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi sebab Rusia merupakan negara penghasil komoditas minyak terbesar di Eropa, saat itu mereka membutuhkan komoditas tersebut untuk menjalankan misi militer. Sedangkan, Ukraina menginginkan untuk menjadi anggota NATO dan meminta bantuan untuk melawan Rusia. Hal ini membuat Rusia memberhentikan ekspor minyak ke sejumlah negara.

Harga minyak adalah komponen yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah (Setjen DPR RI, 2013). Pemerintah telah melakukan penyesuaian

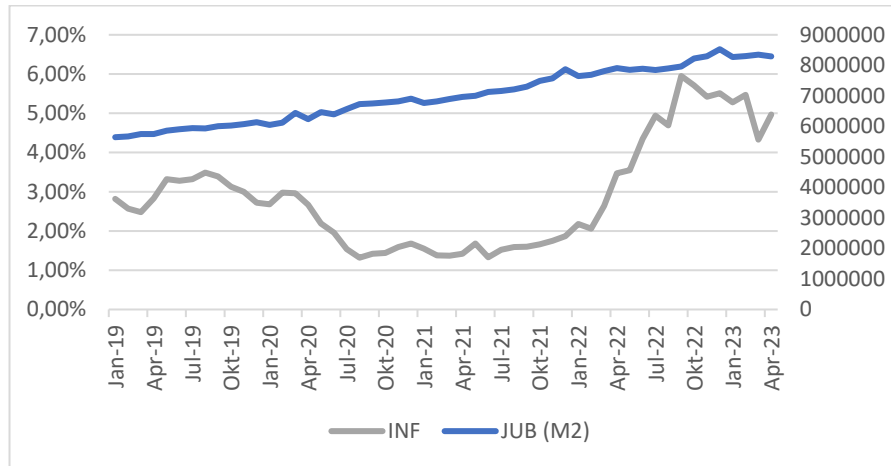
APBN untuk menstabilkan harga minyak domestik agar tidak menyebabkan inflasi. Inflasi di Indonesia tergolong sebagai *cost push inflation*, karena kenaikan harga minyak berdampak pada harga produk yang dihasilkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah melakukan peningkatan anggaran subsidi dan kompensasi energi merespon kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP. Namun berdasarkan data dari Kementerian Keuangan total kompensasi pertalite atau BBM subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran. BBM subsidi lebih banyak dinikmati oleh pelaku dunia usaha dan rumah tangga konsumsi daripada masyarakat tidak mampu. Demikian, pemerintah memutuskan untuk menetapkan kebijakan untuk menaikkan harga pada semua jenis BBM. Anggaran untuk subsidi dinaikkan untuk menjamin kebutuhan jumlah energi di dalam negeri. Namun, pengeluaran pemerintah lebih difokuskan untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Laju inflasi selain sebagai indikator stabilitas ekonomi juga merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Naiknya inflasi yang terus menerus akan menghambat pertumbuhan perekonomian setiap negara. Untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan suku bunga, likuiditas perbankan, dan pengendalian jumlah uang beredar M2. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen memiliki wewenang dalam kebijakan moneter di Indonesia serta memiliki tugas mengatur suku bunga, likuiditas perbankan dan stabilitas harga dan nilai rupiah. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, termasuk kebijakan anggaran, stimulus ekonomi, dan pembebasan pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal memiliki

kewenangan dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah, termasuk anggaran, stimulus ekonomi, dan perpajakan untuk menstabilkan *supply-demand* dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dalam mencapai sasaran inflasi diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menciptakan sebuah kebijakan makroekonomi yang terintegrasi dengan baik melalui kebijakan fiskal dan moneter. Inflasi tidak sepenuhnya tanggung jawab dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, melainkan terdapat fungsi pemerintah dalam menjaga inflasi dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal. Sebagaimana tiga fungsi pokok anggaran yang merupakan komponen dari kebijakan fiskal yang terdiri dari: 1) fungsi distribusi pendapatan; 2) fungsi stabilisasi ekonomi; 3) fungsi alokasi sumber daya. Ketiga fungsi ini berkorelasi dengan kebijakan moneter dalam proses pengendalian inflasi. Kebijakan makroekonomi yang baik adalah yang terdapat keseimbangan koordinasi antara dua kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal) yang mana keduanya tidak saling meniadakan dan tidak saling mendominasi satu sama lain dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi.

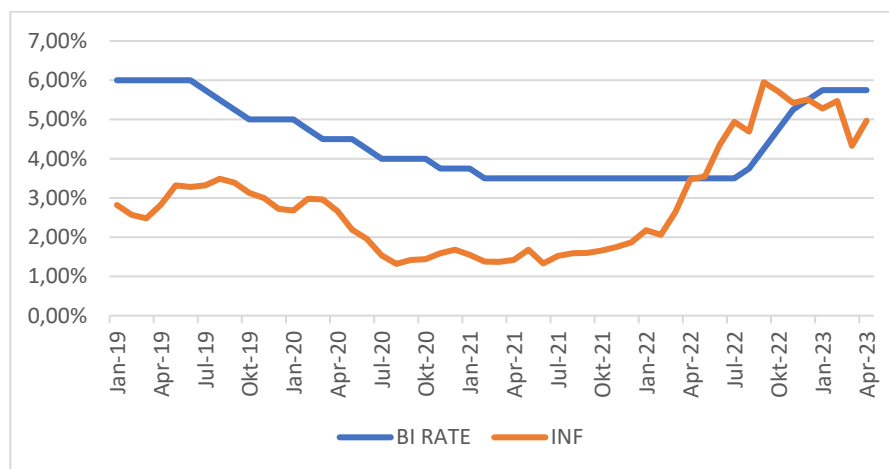
Gambar 1.1 Grafik Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (M2)
Januari 2019 - April 2023



(Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, diolah)

Jumlah uang beredar (M2) sudah mengalami pertumbuhan ada sejak 2019. Namun dapat disoroti pada gambar grafik 1.1, bulan Maret 2020 terjadi kenaikan yang signifikan terhadap jumlah uang beredar (M2) yaitu sebesar 322981,48 milyar rupiah (mtm) atau naik 5,28% dari bulan sebelumnya. Kemudian, di dua bulan setelahnya mengalami fluktuasi yang drastis. Pada bulan April JUB mengalami penurunan sebesar 204844,21 milyar rupiah (mtm) atau berkurang 3,18% dari bulan sebelumnya, kemudian Mei kembali bertambah 228710,61 milyar rupiah (3,67%). Hal ini didorong oleh perubahan jumlah surat berharga bank yang dimiliki oleh korporasi finansial, giro rupiah, dan komponen uang M1.

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Inflasi dan BI Rate Januari 2019 – April 2023



(Sumber: Bank Indonesia, diolah)

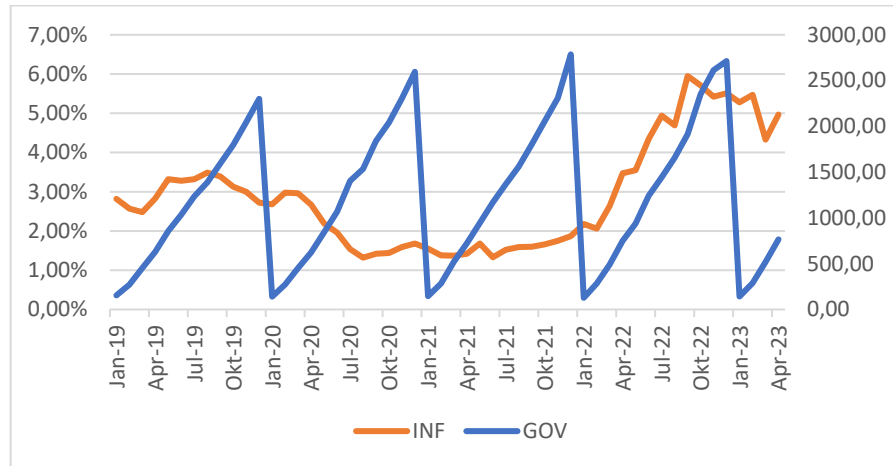
Ditinjau dari grafik pada gambar 1.2 tingkat Inflasi selama pandemi COVID-19 cenderung mengalami penurunan di mana pada Januari 2020 inflasi sebesar 2,82% turun menjadi 2,48% pada Maret 2020. Kemudian inflasi sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh 3,39% pada September, dan berlanjut pada rata-rata $>3\%$ dan ditutup di tingkat 1,68% pada bulan Desember. Inflasi pada 2020 melebihi target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sekitar kurang lebih 3% dan inflasi ini tergolong kategori inflasi ringan karena kurang dari 10%. Selama tahun 2020 aktivitas ekonomi masyarakat masih rendah terlihat dari tingkat inflasi yang rendah dan cenderung menurun. Selama 2021 laju inflasi bulanan relatif rendah dan bergerak lambat di bawah 2%. Sedangkan pergerakan suku bunga BI tidak berubah dari Februari 2021 hingga Juli 2022 yaitu stagnan pada tingkat 3,50%. Setelah bulan Juli 2022, eskalasi perubahan suku bunga BI mengalami percepatan. Suku bunga acuan yang pada awalnya 3,50% ditingkatkan Bank Indonesia sebagai langkah *front loaded*, *pre-emptive* dan *forward looking*. Kebijakan

ini dilakukan dalam rangka menurunkan ekspektasi inflasi sekaligus memastikan bahwa inflasi berada pada kisaran sasaran 2%-4%.

Dari grafik pada gambar 1.2 bisa disimak bahwa otoritas moneter lebih cenderung menetapkan suku bunga acuan rendah untuk mendorong ekspansi perekonomian. Namun tindakan ini diduga belum mampu mengendalikan inflasi secara konsisten. Kecenderungan pada situasi ekonomi global dan tingginya ekspektasi inflasi di masyarakat menyebabkan peran suku bunga kebijakan (BI Rate) kurang optimal dalam mempengaruhi inflasi. Tingkat inflasi yang sepanjang tahun 2020 hingga 2021 cenderung rendah mengalami kontraksi di sepanjang tahun 2022 hingga memecahkan rekor inflasi tertinggi sejak 2014 yaitu 5,95%.

Pemerintah pada 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai upaya penanggulangan wabah COVID-19 dan mereduksi pengaruhnya terhadap sosio-ekonomi masyarakat. Pemerintah telah menyusun tiga langkah stimulus untuk menghadapi dampak terhadap sektor ekonomi yang ditimbulkan wabah COVID-19, diantaranya: pertama, memperkuat ekonomi domestik, kedua, menjaga daya beli masyarakat, dan ketiga, percepatan penanganan COVID-19.

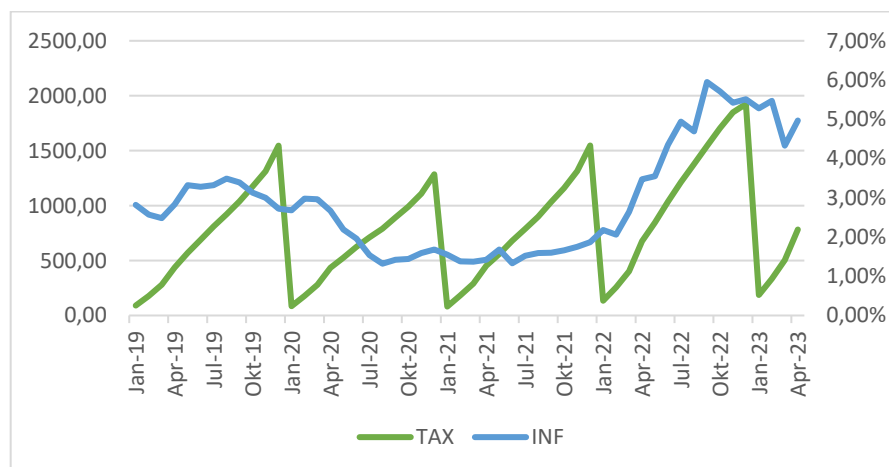
Gambar 1.3 Grafik Tingkat Inflasi dan Belanja Pemerintah Januari 2019 - April 2023



(Sumber: Kementerian Keuangan, diolah)

Belanja negara dari tahun 2019 hingga tahun 2022 berperan besar dalam stabilisasi inflasi. Namun pada tahun 2022 dimana terjadi konflik geopolitik antara negara Rusia dan Ukraina, kebijakan defisit anggaran justru dikurangi sebab ada temuan ketidakefisienan dari APBN tahun sebelumnya. Pengurangan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca berkurangnya penularan kasus COVID-19 ditengah harga minyak dan bahan pangan yang melonjak memunculkan pertentangan dari masyarakat. Konsistensi kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi tingkat inflasi menjadi pertanyaan besar yang perlu dianalisa untuk mengetahui jawabannya.

**Gambar 1.4 Grafik Tingkat Inflasi dan Pendapatan Pajak
Januari 2019 - April 2023**



(Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, diolah)

Pendapatan perpajakan pemerintah pada tahun 2019 yang relatif tinggi didukung oleh perekonomian domestik yang sedang bertumbuh. Namun, pada tahun 2020 dapat dilihat dari grafik pada gambar 1.4, dimana pendapatan perpajakan turun diduga disebabkan dari pemberian insentif perpajakan berupa pembebasan dan pengurangan pungutan pada obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Pemberian insentif perpajakan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta membantu likuiditas dan kelangsungan dunia usaha di dalam negeri. Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Regulasi baru tersebut berhasil membuat penerimaan perpajakan meningkat, sejalan dengan utilisasi tenaga kerja dan peningkatan impor.

Tingkat inflasi di Indonesia sangat berfluktuatif dan terdapat perbedaan selama masa COVID-19 (Januari 2019 sampai bulan Januari 2022) dan masa ketegangan Rusia-Ukraina (Februari 2022 hingga April 2023). Pada saat krisis wabah penyakit dan ketegangan Rusia-Ukraina, pemerintah (Kementerian Keuangan) secara berkelanjutan mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, begitu pula Bank Indonesia telah mengatur kebijakan moneter dengan instrumen-instrumennya sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai sasaran inflasi. Pada masa krisis COVID-19 tingkat inflasi cenderung rendah dan stabil. Namun berbanding terbalik saat terjadinya ketegangan Rusia-Ukraina, inflasi bulanan melonjak dengan cepat hingga mencatatkan rekor tertinggi sejak tahun 2014. Dapat diduga bahwa terdapat perbedaan perlakuan kebijakan ekonomi terhadap inflasi dan besaran pengaruh rata-rata kebijakan terhadap inflasi pada masa pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah ada pengaruh yang signifikan jumlah uang beredar M2 terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 2) Apakah ada pengaruh yang signifikan suku bunga BI terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 3) Apakah ada pengaruh yang signifikan belanja pemerintah terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?

- 4) Apakah ada pengaruh yang signifikan pajak terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 5) Apakah ada perbedaan rata-rata jumlah uang beredar M2 yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 6) Apakah ada perbedaan rata-rata suku bunga BI yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 7) Apakah ada perbedaan rata-rata yang belanja negara yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 8) Apakah ada perbedaan rata-rata pajak yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?
- 9) Apakah ada perbedaan rata-rata inflasi yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan jumlah uang beredar M2 terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan suku bunga BI terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina

- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan belanja pemerintah terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina
- 4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pajak terhadap inflasi pada masa COVID-19 dan ketegangan Rusia-Ukraina
- 5) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah uang beredar M2 yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina
- 6) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan suku bunga BI yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina
- 7) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan belanja pemerintah yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina
- 8) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pajak yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina
- 9) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan inflasi yang signifikan pada masa COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel. Data statistik diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan pengeluaran tingkat kementerian/lembaga di *website* resmi Kementerian Keuangan, statistik BI 7-Day Repo Rate dan inflasi di *website* resmi Bank Indonesia dan statistik jumlah uang beredar M2 di *website* resmi Kementerian Perdagangan RI dengan periode waktu dari Januari 2019 hingga April 2023.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia pada masa krisis COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Melalui penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana perbedaan besaran pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada masa krisis COVID-19 dan krisis ketegangan Rusia-Ukraina terhadap inflasi. Penelitian ini menggunakan variabel belanja pemerintah, variabel pajak, variabel jumlah suku bunga Bank Indonesia, variabel jumlah uang beredar (M2) sebagai variabel independen dan inflasi sebagai variabel dependen.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan, sekaligus merupakan bentuk implementasi ilmu yang diperoleh peneliti selama menempuh perkuliahan sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian tentang kebijakan ekonomi, khususnya mengenai pengaruh peristiwa wabah penyakit dan ketegangan geopolitik suatu negara terhadap perekonomian dan dinamika kebijakan ekonomi Indonesia.
- 2) Bagi universitas, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan referensi informasi untuk pengembangan mahasiswa dan dosen yang akan melakukan penelitian dengan topik permasalahan serupa.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat yang membutuhkan, sebagai informasi yang dapat

memperluas wawasan mengenai pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap inflasi.

- 4) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh sebuah kebijakan ekonomi, yaitu fiskal dan moneter terhadap inflasi.